



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Tempat dan waktu penelitian:

Tempat : PT Lab Medika Sejahtera

Jl. Kencanasari Timur VIII H-1, Surabaya.

Waktu : Peneliti akan mengadakan penelitian di PT Lab Medika

Sejahtera pada periode 1 Januari 2015 -- 30 November 2015.

3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data

3.2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam.

3.2.2 Sumber Data

Data internal merupakan data penelitian yang berupa dokumen• dokumen akuntansi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan di dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini data internal diperoleh dari perusahaan berupa buku penjualan, buku pembelian, buku kas dan bank, serta laporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan data lain yang diperlukan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan juga merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif *deskriptif* melalui proses wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara berdialog secara lisan untuk mendapatkan informasi secara langsung berkaitan dengan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian, wawancara ini dilakukan dengan kepala bagian pembukuan dan pajak untuk mendapatkan informasi mengenai operasional perusahaan. Selain melakukan wawancara, pengumpulan data didapatkan melalui observasi pada dokumen-dokumen perusahaan yang digunakan sebagai lampiran apabila melakukan pengajuan permohonan pengembalian (restitusi). Dokumen-dokumen tersebut adalah faktur pembelian atau penjualan, penerimaan atau pengiriman barang, pengeluaran atau penerimaan kas atau bank, serta Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

3.4 Satuan Kajian

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan/ atau ekspor jasa kena pajak. Pada saat menjual barang maka disebut pajak keluaran sebesar 10% dari DPP dan setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/ JKP harus memungut pajak keluaran kepada pembeli (Wahyono, 2012:305).





Pajak Masukan (PM) adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/ atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/ atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar dan/ atau impor Barang Kena Pajak. Pada saat membeli barang disebut Pajak Masukan sebesar 10% dari DPP.

Pajak yang harus dibayar adalah Pajak Keluaran Pajak Masukan dalam bulan tersebut atau disebut pengkreditan Pajak Masukan. Apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dibanding dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak memiliki hutang pajak lain maka dapat dikatakan terjadi lebih bayar dan dapat direstitusikan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis sesuai dengan peraturan pajak yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4) UU PPN. (Wahyono, 2012:306).

Dalam pengajuan surat permohonan tertulis, terdapat bukti-bukti atau dokumen yang harus disampaikan, yakni faktur penjualan dan/ atau faktur pembelian, bukti pengiriman dan/ atau pemberitahuan barang, bukti penerimaan dan/ atau pembayaran uang atas pembelian dan/ atau penjualan barang atau jasa (Sukardi, 2010:205).

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi dan wawancara. Berdasarkan UU KUP Pasal 17 mengenai permohonan restitusi, yang dilakukan sebelum PKP ditetapkan sebagai PKP Kriteria Tertentu, dilakukan pemeriksaan atas dokumen atau bukti sebagai lampiran, langkah• langkah yang hams dilakukan adalah:

1. Menganalisa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk melihat ketepatan waktu dalam pelaporan PPN;
2. Menganalisa bahwa perusahaan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Memeriksa Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik untuk melihat pendapat yang diberikan oleh Auditor dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan;
4. Menganalisa faktur pajak keluaran dan faktur pajak, termasuk dokumen• dokumen penunjang berikut:
 - a. Dokumen faktur penjualan atau faktur pembelian;
 - b. Dokumen penerimaan atau pengiriman barang;
 - c. Dokumen pembayaran atau penenmaan uang atas pembelian atau penjualan barang atau jasa;





BABIV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Penelitian dilakukan pada PT Lab Medika Sejahtera Surabaya yang beralamat di Jalan Kencanasari Timur VII-H/1 Surabaya. PT Lab Medika adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi yang didirikan dan disahkan pada tanggal 10 Januari 1992 sesuai akta nomor 36. PT Lab Medika Sejahtera Surabaya adalah perusahaan induk dan memiliki 2 (dua) anak cabang perusahaan yaitu PT Lab Medika Sejahtera Malang dan PT Lab Medika Sejahtera Bali.

PT Lab Medika Sejahtera Surabaya memiliki modal dasar sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Direktur dan pemilik atau pemegang saham yang berwenang atas perusahaan PT Lab Medika Sejahtera Surabaya terhitung sejak tanggal berdirinya perusahaan adalah:

1. Paulus Totok Lusida yang memegang 5 (lima) saham, dengan nilai nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Agus Sutikno Gunawan, memegang 5 (lima) saham, dengan nilai nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Punto Wijoyo, memegang 5 (lima) saham, dengan nilai nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Sriany Angkadjaja, memegang 5 (lima) saham, dengan nilai nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Pada tanggal 12 Oktober 1994 diterbitkan akta perubahan yang menjelaskan bahwa tuan Agus Sutikno selaku Direktur dan Pernilik atau pernegang 5 (lima) saham menyerahkan atau menjual seluruh sahamnya kepada Tuan Paulus Totok Lusida. Pada tanggal 22 Juni 1995 terjadi penerbitan akta atas perubahan kembali saham yang dimiliki oleh nyonya Sriany Angkadjaja selaku Direktur dan Pernilik atau pernegang 5 (lima) saham kepada nyonya Krestine Geoewana dan 3 (tiga) saham kepada tuan Paulus Totok Lusida.

Pada tanggal 13 Maret 1996 terjadi perubahan akta kembali atas penjualan saham milik nyonya Krestine Goewana sebanyak 2 (dua) saham kepada tuan Paulus Totok Lusida. Pada tanggal 9 Juni 1997 saham milik tuan Punto Wijoyo sebanyak 2 (dua) saham dijual kepada nyonya Melani Gunawan yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-3.394 HT.01.01 TH.95.

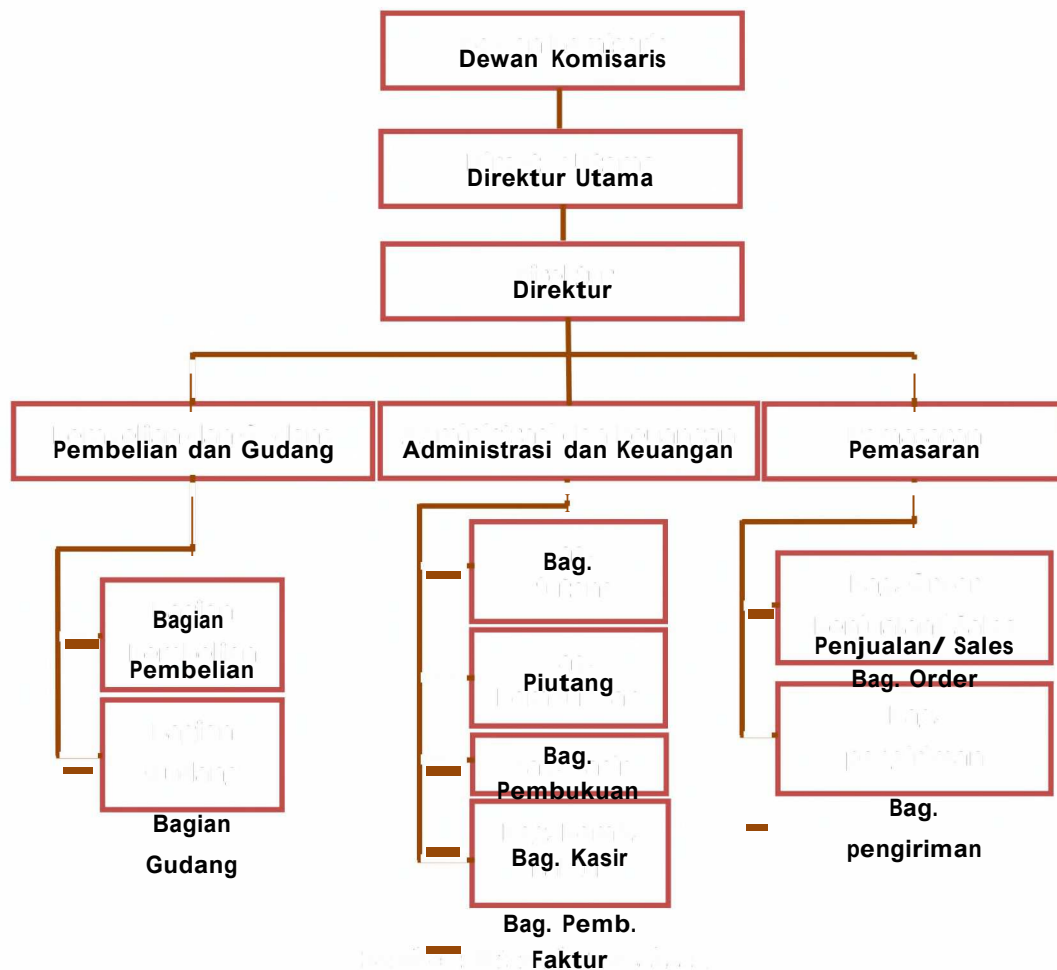
Penerbitan akta pada tanggal 8 Februari 1998 menjelaskan bahwa kepemilikan atas perseroan terbatas PT Lab Medika Sejahtera sebagai Dewan Komisaris dipegang oleh tuan Paulus Totok Lusida yang memiliki 18 (delapan belas) saham dan nyonya Melani gunawan sebagai Direktur Utama yang memiliki 2 (dua) saham. Seiring berkembangnya perusahaan, terhitung tanggal 5 Mei 1998 kepemilikan saham tuan Paulus Totok Lusida sebanyak 72 (tujuh puluh dua) saham dan kepemilikan saham nyonya Melani Gunawan sebanyak 8 (delapan) saham.

4.1.2 Jenis Usaha Perusahaan

PT Lab Medika Sejahtera Surabaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan dan cairan infus, biasa disebut dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF). Perusahaan ini termasuk dalam golongan jenis usaha perdagangan menengah yang menjual atau sebagai distributor obat-obatan sesuai dengan surat ijin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 503/7167.A/436.6.11/2013.

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 4.1.3.1
Struktur Organisasi



Sumber : Internal Perusahaan

4.1.4 *Job Description*

1. Dewan Komisaris dan Direktur Utama
 - a. Sebagai pemegang saham;
 - b. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha pada perusahaan;
 - c. Menetapkan tujuan serta kebijaksanaan umum perusahaan dan menentukan strategi perusahaan dalam mencapai tujuan;
 - d. Merumuskan perencanaan-perencanaan jangka panjang perusahaan;
 - e. Melakukan evaluasi atas anggaran yang disusun;
 - f. Mengambil keputusan-keputusan strategis;
 - g. Memberikan nasihat kepada direktur dalam melaksanakan pengurusan perusahaan.
2. Direktur
 - a. Memimpin dan mengawasi penyelenggaraan operasional perusahaan sehari-hari;
 - b. Mengusahakan pemecahan masalah;
 - c. Merencanakan dan menyusun perencanaan pembelian;
 - d. Membuat perencanaan pengembangan dan usaha perusahaan dalam jangka pendek atau panjang;
 - e. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya;
 - f. Bertanggungjawab kepada direktur utama.
3. Bagian Pembelian
 - a. Menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang;
 - b. Memeriksa *stock* barang untuk dilakukan pemesanan;
 - c. Melakukan order pembelian kepada pemasok yang dipilih.



4. Bagian Gudang

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan proses penenmaan, penyimpanan dan keluarnya barang serta pelaksanaan administrasi barang yang ada di gudang;
- b. Melakukan dokumentasi yang lengkap dan benar untuk mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan, pengadaan dan penyaluran barang;
- c. Berhak untuk memeriksa dokumen-dokumen pengadaan dan penyaluran barang.

5. Bagian Pengiriman

- a. Melakukan pengiriman yang telah disiapkan oleh bagian gudang ke tempat *supplier*;
- b. Memberikan faktur penjualan untuk ditandatangani dan diberi cap stempel.

6. Bagian Order Penjualan atau *Sales*

- a. Melakukan kegiatan penjualan, mencari pelanggan baru dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan;
- b. Mencatat order yang diterima dari pelanggan;
- c. Membantu direktur dalam mengumpulkan informasi pasar yang berguna untuk pengambilan keputusan;
- d. Melaksanakan penagihan piutang.





7. Bagian Piutang

- a. Melakukan pelunasan faktur yang telah dibayar;
- b. Memberikan faktur kepada sales untuk dibagikan kepada outlet;
- c. Mencatat atau mengupdate piutang yang belum dibayar;
- d. Mengarsip faktur penjualan.

8. Bagian Pembukuan

- a. Menerima bukti penerimaan kas dan bank;
- b. Menerima bukti pengeluaran kas dan bank;
- c. Melakukan koordinasi dengan kasir terhadap validasi bukti penerimaan atau pengeluaran kas dan bank sebelum melakukan pencatatan pada system komputerisasi;
- d. Menginput bukti penerimaan atau pengeluaran kas dan bank ke dalam program tabelaris;
- e. Mengarsip bukti pengeluaran atau penerimaan kas dan bank;
- f. Membuat faktur pajak pembelian atau penjualan;
- g. Menyetor dan melaporkan SPT Masa PPN atau SPT Tahunan;
- h. Mengarsip faktur pajak pembelian atau penjualan dan bukti setoran SPT.

9. Bagian Kasir

- a. Bertanggung jawab atas penerimaan kas atau bank dari piutang yang tekah ditagih dari pelanggan;
- b. Melaksanakan pembayaran utang kepada *supplier*;
- c. Membuat bukti setor kas atau bank dan menyetorkan ke kas atau bank;

- d. Membuat dan melaporkan dana operasional transaksi harian dan bulanan;
- e. Melakukan konfirmasi atau koordinasi atas validasi bukti penerimaan atau pengeluaran kas atau bank dengan bagian pembukuan;
- f. Mengarsip seluruh bukti setoran bank.

10. Bagian Pembuatan Faktur

- a. Membuat faktur penjualan;
- b. Meyerahkan faktur penjualan ke bagian piutang untuk diberikan kepada sales;
- c. Menerima dan mencatat faktur penjualan yang telah kembali dan distempel;
- d. Mengarsip lembar *copy* faktur penjualan.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

PT Lab Medika Sejahtera adalah perusahaan yang melakukan penyerahan dan penerimaan Barang Kena Pajak (BKP). Sehingga terdapat perhitungan atau nilai PPN yang harus dilaporkan oleh perusahaan atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipungut oleh perusahaan, dan perusahaan harus menerbitkan faktur pajak. Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar perusahaan karena perolehan Barang Kena Pajak dan sebagai bukti pembayaran perusahaan harus mendapatkan faktur pajak.





Jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan kemudian dibandingkan sehingga dapat diketahui apakah terjadi Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar atau Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar. Pada perusahaan PT Lab Medika Sejahtera Surabaya, di akhir tahun buku terjadi Lebih Bayar yang diakibatkan oleh Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak keluaran.

Dalam mekanismenya permintaan pengembalian atas lebih bayar atau restitusi telah diatur dalam Pasal 17 UU KUP bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan ternyata benar bahwa jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau dibebaskan dapat dilakukan pada akhir Masa Pajak. Dalam peraturan ini, dapat membantu perusahaan untuk meminta pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pajak sesuai dengan aturannya berdasarkan undang-undang perpajakan bersifat wajib dan memaksa. Pada badan usaha ataupun orang pribadi akan dikenakan PKP apabila melakukan penyerahan BKP dalam satu tahun peredaran bruto atau jumlah keseluruhan penyerahan BKP melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2010. PT Lab Medika Sejahtera merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dikarenakan peredaran bruto melebihi batas ketentuan yang berlaku. Perusahaan setelah ditetapkan sebagai PKP, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas perusahaan.

Berdasarkan gambaran perusahaan yang telah dijelaskan di atas, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan observasi dokumen-dokumen perusahaan. Berikut adalah hasil dari wawancara antara peneliti dengan 3 (tiga) informan:

1. Thu Indayani dengan jenis kelamin perempuan berusia sekitar 45-48 tahun yang bekerja di perusahaan pada bagian pembukuan.

Hasil:

- a. PT Lab Medika Sejahtera Surabaya merupakan Pengusaha Kena Pajak dikarenakan peredaran bruto atau jumlah penerimaan keseluruhannya melebihi batas PKP yang telah ditentukan, sehingga perusahaan memiliki NPWP.
- b. Pembuatan faktur jual dibedakan dengan faktur pajak.
- c. Dalam perhitungan PPN atau pajak terutang, dilakukan jasa konsultan pajak, perusahaan hanya menerima SPT Masa PPN yang telah dilaporkan.
- d. Pada akhir tahun buku 2015 apabila terjadi lebih bayar akan dilakukan restitusi PPN.
- e. Membuat SSP sendiri sebagai bukti pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah.
- f. Perusahaan tidak pernah terlibat tindak pidana hukum. Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atas kepentingan permohonan kredit bank.





2. Thu Tuti dengan jenis kelamin perempuan berusia 40-43 tahun, sebagai Konsultan Pajak PT Lab Medika Sejahtera Surabaya.

Hasil:

- a. Dalam pelaporan PPN PT Lab Medika Sejahtera sering mengalami lebih bayar dikarenakan pada saat mendekati akhir tahun perusahaan melakukan pembelian yang cukup besar untuk mendapat diskon yang tinggi dan menghindari kenaikan harga pada tahun yang akan datang.
 - b. Dalam masa Januari 2015 sampai dengan November 2015 PT Lab Medika Sejahtera Surabaya mengalami lebih bayar sebanyak 6 (enam) kali masa PPN dilaporkan.
 - c. Pernah terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN.
3. Thu Aristin dengan jenis kelamin perempuan berusia 40-43 tahun, sebagai Konsultan Pajak PT Lab Medika Sejahtera Surabaya.

Hasil:

- a. Seluruh pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh PT Lab Medika Sejahtera Surabaya bukan termasuk jenis barang yang tidak dikenakan PPN yang dijelaskan pada Pasal 4A UU PPN, sehingga seluruh penyerahan BKP yang dilakukan dikenakan PPN.
- b. Perhitungan PPN adalah 10% dari nilai DPP.

- c. Pembayaran pajak dilakukan oleh konsultan pajak dengan meminta uang terlebih dahulu di perusahaan berdasarkan perhitungan pajak terutang.
- d. Pembayaran pajak dilakukan pada Bank Persepsi, perusahaan tidak pernah melakukan pembayaran melalui kantor pos.

Dalam mekanismenya, prinsip pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diatur dalam Pasal 17 UU KUP bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan ternyata benar jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Ketika melakukan pengajuan restitusi maka akan dilakukan pemeriksaan atas faktur pajak yang dilapiri dengan dokumen faktur penjualan atau pembelian (jika dibuat berbeda dengan faktur pajak), bukti pengiriman atau penerimaan barang dan bukti pembayaran atau penerimaan uang atas pembelian atau penjualan BKP. Dokumen yang telah disebutkan tersebut tidak wajib disampaikan apabila PKP termasuk PKP Kriteria Tertentu.



PKP Kriteria tertentu yang dimaksud di atas adalah:

Tabel 4.2.1
PKP Kriteria Tertentu

No	Kriteria Tertentu	Analisa Perusahaan	V/ X
1.	Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.	Pada PT Lab Medika Sejahtera, pelaporan SPT Masa PPN cenderung tepat waktu, tetapi pada pelaporan SPT Masa PPN masa April 2015 ditemukan bahwa perusahaan terlambat melapor. Batas waktu dari pelaporan masa April 2015 adalah tanggal 31 Mei 2015, tetapi perusahaan baru melaporkan SPT Masa PPN pada tanggal 1 Juni 2015.	X
2.	Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.	Dari hasil wawancara dengan Ibu Indah mengatakan bahwa PT Lab Medika Sejahtera Surabaya tidak pernah atau tidak memiliki tunggakan pajak jenis apapun.	V
3.	Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.	Pada PT Lab Medika Sejahtera Surabaya Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tahun 2014 yang dibandingkan dengan tahun 2013, dengan pendapat serta pada tahun 2015 dengan perbandingan tahun 2014.	X

No	Kriteria	Yang terjadi di Perusahaan	V/X
4.	Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.	Menurut hasil wawancara dengan Ibu Indayani baik atas nama perorangan (pemilik usaha) atau badan tidak pernah terlibat tindak pidana dan dipidana dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.	V

Dari hasil wawancara, observasi dan pengamatan data, dapat disimpulkan bahwa PT Lab Medika Sejahtera Surabaya bukan termasuk PKP Kriteria Tertentu dikarenakan sesuai dengan Pasal 17C UU KUP dalam masa pelaporan SPT Masa PPN terdapat keterlambatan pelaporan, dan untuk syarat Laporan Keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik perusahaan belum diaudit selama batas minimal periode yang ditentukan dan pendapat yang diberikan oleh auditor bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melainkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada periode 2014 dan Wajar pada periode 2013.

4.3 Pembahasan dan Analisa Data

- 1) Menganalisa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk melihat ketepatan waktu dalam pelaporan PPN

Dari deskripsi hasil penelitian yang dijelaskan untuk menilai perusahaan sebagai PKP kriteria tertentu, pada tahapan yang pertama dilakukan analisa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN selama tahun 2015.

Tabel 4.3.1

Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Masa PPN

No	Masa	Kurang / (lebih)	Tgl Lapor
1	Masa Januari 2015	(Rp 5.129.291,-)	26 Feb 15
2	Masa Februari 2015	Rp 1.493.706,•	27 Maret' 15
3	Masa Maret 2015	(Rp 11.229.988,-)	30 April 2015
4	Masa April 2015	(Rp 41.686.938,-)	1 Juni '15
5	Masa Mei 2015	(Rp 1.617.791,-)	30 Juni 15
6	Masa Juni 2015	(Rp 38.777.443,-)	31 Juli 15
7	Masa Juli 2015	Rp 5.179.639,•	28 Agst 15
8	Masa Agustus 2015	Rp 6.450.661,•	30 Sept 15
9	Masa September 2015	Rp 7.509.908,•	29 Okt 15
10	Masa Oktober 2015	Rp 5.102.054,•	27 Nov 15
11	Masa November 2015	(Rp 4.529.011,-)	30 Des 15

Sumber : Internal Perusahaan

Pada dasarnya batasan dari pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan selanjutnya. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi keterlambatan atas pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan pada bulan April 2015. Pada bulan April 2015 PT Lab Medika Sejahtera Surabaya melaporkan SPT Masa PPN pada tanggal 1 Juni 2015, seharusnya batasan dari pelaporan April adalah 31 Mei 2015.

Pada bulan Januari 2015 sampai dengan November 2015 PT Lab Medika Sejahtera Surabaya melakukan penjualan kepada apotik atau perusahaan swasta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.2

Penyerahan BKP kepada Perusahaan Swasta

No	Masa	DPP	PPN
1	Masa Januari 2015	Rp 3.041.896.137,-	Rp 304.189.034,-
2	Masa Februari 2015	Rp 3.376.959.504,-	Rp 337.694.848,-
3	Masa Maret 2015	Rp 4.279.834.774,-	Rp 427.982.330,-
4	Masa April 2015	Rp 3.506.108.095,-	Rp 350.609.702,-
5	Masa Mei 2015	Rp 3.649.032.399,-	Rp 364.902.360,-
6	Masa Juni 2015	Rp 4.217.359.005,-	Rp 421.734.662,-
7	Masa Juli 2015	Rp 4.133.298.027,-	Rp 413.333.472,-
8	Masa Agustus 2015	Rp 4.280.914.441,-	Rp 428.090.326,-
9	Masa September 2015	Rp 3.676.173.236,-	Rp 367.616.239,-
10	Masa Oktober 2015	Rp 4.220.288.166,-	Rp 422.027.653,-
11	Masa November 2015	Rp 4.561.295.763,-	Rp 456.128.494,-
TOTAL		Rp 42.943.159.547,-	Rp 4.294.309.120,-

Sumber : Internal Perusahaan

Jumlah penjualan atau penyerahan BKP kepada perusahaan swasta atau apotik dengan total DPP Rp 42.943.159.547,00 (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dan PPN sebesar Rp 4.294.309.120,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).

Selain melakukan penjualan pada perusahaan swasta atau apotik, PT Lab Medika Sejahtera Surabaya juga melakukan penjualan kepada perusahaan pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.3

Penyerahan BKP kepada Perusahaan Pemerintah

No	Masa	DPP	PPN
1	Masa Januari 2015	Rp 12.127.300,-	-
2	Masa Februari 2015	Rp 24.265.308,-	-
3	Masa Maret 2015	Rp 29.892.62,-	-
4	Masa April 2015	Rp 30.457.940,-	-
5	Masa Mei 2015	Rp 20.184.200,-	-
6	Masa Juni 2015	Rp 1.824.000,-	-
7	Masa Juli 2015	-	-
8	Masa Agustus 2015	Rp 12.240.791,-	-
9	Masa September 2015	Rp 1.824.000,-	-
10	Masa Oktober 2015	-	-
11	Masa November 2015	Rp 117.693.941,-	-
TOTAL		Rp 250.510.082,-	Rp -

Sumber : Internal Perusahaan

Dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti atas PPN yang dipungut oleh pemungut PPN hanya didapat bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015. Untuk dokumen SSP bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 perhitungan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan dikerjakan oleh konsultan pajak sehingga laporan SPT Masa PPN selama bulan tersebut dipegang oleh konsultan pajak dan belum dikembalikan ke perusahaan.

Tabel 4.3.4

Surat Setoran Pajak Bendaharawan Pemerintah

No	Tgl Faktur	No. Faktur	Nama	Nilai (PPN)
1	15/08/ 2015	020.002- 15.22461504	RS.BHAYANGKARA PUSDIK BRIMOB	Rp 813.679,-
2	27/08/ 2015	020.002- 15.22462586	BEND.RUMAH SAKIT BHAYANGKARAPORONG	Rp 228.000,-
3	28/08/ 2015	020.002- 15.22462676	BEND.RUMAH SAKIT BHAYANGKARAPORONG	Rp 182.400,-
4	09/09/ 2015	020.003- 15.58829193	BEND.RUMAH SAKIT BHAYANGKARAPORONG	Rp 182.400,-
5	02/11/ 2015	020.003- 15.58834554	DINAS KESEHATAN PROVINS! JAWA TIMUR	Rp 9.644.947,-
6	02/11/ 2015	020.003- 15.58834555	DINAS KESEHATAN PROVINS! JAWA TIMUR	Rp 1.903.647,-
7	18/11/ 2015	020.003- 15.58836307	BEND.RUMAH SAKIT BHAYANGKARAPORONG	Rp 220.800,-
8	07/12/ 2015	020.003- 15.58838157	BEND.RUMAH SAKIT BHAYANGKARAPORONG	Rp 220.800,-
9	23/12/ 2015	020.003- 15.58839824	BEND.RUMAH SAKIT BHAYANGKARAPORONG	Rp 220.800,-

Sumber : Internal Perusahaan



Jumlah DPP Rp 250.510.082,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus sepuluh ribu delapan puluh dua rupiah) dan PPN tidak diperhitungkan dikarenakan perusahaan pemerintah merupakan pemungut PPN. Dari penjualan atau penyerahan BKP kepada perusahaan swasta atau apotik dan perusahaan pemerintah, jumlah penjualan atau penyerahan BKP selama periode Januari 2015 sampai dengan November 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.5
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran

No	Masa	DPP	PPN
1	Masa Januari 2015	Rp 3.054.023.437,-	Rp 304.189.034,-
2	Masa Februari 2015	Rp 3.401.224.812,-	Rp 337.694.848,-
3	Masa Maret 2015	Rp 4.309.727.376,-	Rp 427.982.330,-
4	Masa April 2015	Rp 3.536.566.035,-	Rp 350.609.702,-
5	Masa Mei 2015	Rp 3.669.216.599,-	Rp 364.902.360,-
6	Masa Juni 2015	Rp 4.219.183.005,-	Rp 421.734.662,-
7	Masa Juli 2015	Rp 4.133.298.027,-	Rp 413.333.472,-
8	Masa Agustus 2015	Rp 4.293.155.232,-	Rp 428.090.326,-
9	Masa September 2015	Rp 3.677.997.236,-	Rp 367.616.239,-
10	Masa Oktober 2015	Rp 4.220.288.166,-	Rp 422.027.653,-
11	Masa November 2015	Rp 4.678.989.704,-	Rp 456.128.494,-
TOTAL		Rp43.193.669.629,-	Rp 4.294.309.120,-

Sumber : Internal Perusahaan

Jumlah DPP adalah sebesar Rp 43.193.669.629 (empat puluh tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan pajak Keluaran yang dapat dikreditkan sebesar Rp 4.294.309.120 (empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus dua puluh rupiah). Untuk pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak yang dilakukan PT Lab Medika Sejahtera Surabaya mulai Januari 2015 sampai dengan November 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.6
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan

No	Masa	DPP	PPN
1	Masa Januari 2015	Rp 3.093.183.442,-	Rp 309.318.325,-
2	Masa Februari 2015	Rp 3.310.718.657,-	Rp 331.071.851,-
3	Masa Maret 2015	Rp 4.392.123.422,-	Rp 439.212.318,-
4	Masa April 2015	Rp 3.810.666.654,-	Rp 381.066.652,-
5	Masa Mei 2015	Rp 3.234.879.826,-	Rp 324.833.213,-
6	Masa Juni 2015	Rp 4.588.943.494,-	Rp 458.894.314,-
7	Masa Juli 2015	Rp 3.693.763.962,-	Rp 369.376.390,-
8	Masa Agustus 2015	Rp 4.216.397.118,-	Rp 421.639.665,-
9	Masa September 2015	Rp 3.573.689.051,-	Rp 360.107.331,-
10	Masa Oktober 2015	Rp 4.119.611.265,-	Rp 411.961.078,-
11	Masa November 2015	Rp 4.584.315.188,-	Rp 458.431.441,-
TOTAL		Rp 42.640.552.711,-	Rp 4.265.400.185,-

Sumber : Internal Perusahaan

Jumlah DPP pembelian atau penenmaan BKP sebesar Rp 42.640.552.711,00 (empat puluh dua milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dan PPN sebesar Rp 4.265.400.185,00 (empat milyar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Atas penjualan dan pembelian BKP yang dilakukan oleh PT Lab Medika Sejahtera Surabaya pada bulan Januari 2015 sampai dengan November 2015 ditemukan perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Perhitungan atas pajak terutang dari Pajak Keluaran - Pajak Masukan dijelaskan di dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.7
Perhitungan Pajak Terutang

No	Masa	PK	PM	KB/(LB)
1	Januari 2015	Rp 304.189.034,•	Rp 309.318.325,•	(Rp 5.129.291,-)
2	Februari 2015	Rp 337.694.848,•	Rp 336.201.142,•	Rp 1.493.706,•
3	Maret 2015	Rp 427.982.330,•	Rp 439.212.318,•	(Rp 11.229.988,-)
4	April 2015	Rp 350.609.702,•	Rp 392.296.640,•	(Rp 41.686.938,-)
5	Mei 2015	Rp 364.902.360,•	Rp 366.520.151,•	(Rp 1.617.791,-)
6	Juni 2015	Rp 421.734.662,•	Rp 460.512.105,•	(Rp 38.777.443,-)
7	Juli 2015	Rp 413.333.472,•	Rp 408.153.833,•	Rp 5.179.639,•
8	Agustus 2015	Rp 428.090.326,•	Rp 421.639.665,•	Rp 6.450.661,•
9	September 2015	Rp 367.616.239,•	Rp 360.107.331,•	Rp 7.508.908,•



10	Oktober 2015	Rp 422.027.653,-	Rp 414.699.535,-	Rp 7.328.118,-
11	November 2015	Rp 456.128.494,-	Rp 458.431.441,-	(Rp 4.529.011,-)

Sumber : Internal Perusahaan

- 2) Menganalisa bahwa perusahaan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Dari hasil wawancara dengan Ibu Indayani mengatakan bahwa PT Lab Medika Sejahtera Surabaya tidak pernah atau tidak memiliki tunggakan pajak jenis apapun dan perusahaan juga tidak pernah terlibat karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- 3) Memeriksa Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik untuk melihat pendapat yang diberikan oleh Auditor dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan

PT Lab Medika Sejahtera Surabaya pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selama dua tahun. Hasil dari Laporan Auditor Independent tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Akuntan Publik memberikan pendapat wajar, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian pada imbalan kerja dan



pajak penghasilan atas laporan tersebut pada tanggal 25 September 2014. Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik tersebut baru diserahkan kepada perusahaan pada awal Januari 2016 untuk periode 2014 dan 2013.

Dikarenakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bukan termasuk PKP Kriteria Tertentu, maka dalam pengajuan restitusi yang dilakukan, perusahaan harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung yakni Menganalisa faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan.

4) Menganalisa faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan

Selain menganalisa dokumen faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan, terdapat beberapa dokumen yang wajib dilampirkan yang digunakan sebagai penunjang, yakni:

a. Dokumen faktur pembelian atau faktur penjualan;

Dokumen Faktur Pembelian yang diterima oleh PT Lab Medika Sejahtera Surabaya atas pembelian atau penerimaan BKP selama periode Januari 2015 sampai dengan November 2015 diinput kedalam program internal perusahaan yang disebut dengan Buku Pembelian.

Tabel 4.3.8

Buku Pembelian

No	Bulan	Jumlah Faktur
1	Bulan Januari 2015	-
2	Bulan Februari 2015	-
3	Bulan Maret 2015	-
4	Bulan April 2015	-



5	Bulan Mei 2015	-
6	Bulan Juni 2015	-
7	Bulan Juli 2015	280
8	Bulan Agustus 2015	295
9	Bulan September 2015	240
10	Bulan Oktober 2015	259
11	Bulan November 2015	248

Sumber : Internal Perusahaan

Faktur Pajak pembelian yang tersimpan di perusahaan hanya terlihat pada bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015. Pada bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 dikerjakan oleh konsultan pajak, sehingga menjadi keterbatasan peneliti dalam menganalisa data. Sedangkan mulai bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015 pelaporan pajak sudah menggunakan e-Faktur sehingga faktur pajak pembelian maupun penjualan dikerjakan oleh perusahaan.

Faktur penjualan diinput kedalam program perusahaan atau rasio yang nantinya akan terbentuk menjadi buku penjualan. Buku penjualan ini akan dibandingkan dengan faktur pajak penjualan atas kesesuaian jumlah faktur, nomor faktur dan nilai faktur. Untuk nomor faktur diawali dengan kode 010 dan dilanjutkan dengan kode berikutnya, dan untuk perbandingan nilainya jumlah yang terdapat

pada buku penjualan akan dibandingkan dengan jumlah faktur pajak yang dilaporkan.

Pada bulan Januari-Juni 2015, dokumen dipegang oleh konsultan pajak, sehingga peneliti tidak dapat melampirkan data tersebut. Apabila jumlah atau nilai PPN dan nomor faktur sesuai maka akan diberi tanda ✓ (centang) dan apabila tidak sesuai akan diberi tanda X (silang).

Tabel 4.3.9

Perbandingan Buku Penjualan dengan Faktur Penjualan

Bin	No. Faktur	Jumlah B. Penjualan	Jumlah Faktur	✓ / X
1	000.15.56810905-000.15.56812737	1.833	-	-
2	000.15.56812738-000.15.56815920	3.182	-	-
3	000.15.56815921-000.15.56817385	3.251	-	-
3	001.15.19467056-001.15.19468841			
4	001.15.19468842-001.15.19472019	3.178	-	-
5	001.15.19472020-001.15.19473887	2.549	-	-
5	002.15.22452986-002.15.22453666			
6	002.15.22453667-002.15.22457199	3.533	-	-
7	002.15.22457200-002.15.22459835	2.636	2.636	✓
8	002.15.22459836-002.15.22463045	3.210	3.210	✓
9	002.15.22463046-002.15.22463112	2.988	2.988	✓
9	003.15.58828322-003.15.58831242			
10	003.15.58831243-003.15.58834427	3.185	3.185	✓
11	003.15.58834428-003.15.58837458	3.031	3.031	✓

Sumber : Internal Perusahaan



Tabel 4.3.10

Perbandingan Nilai Buku Penjualan dengan Faktur Penjualan

Bin	No. Faktur	Nilai B. Penjualan	Nilai Faktur	/ IX
1	000.15.56810905-000.15.56812737	Rp 306.949.769,-	-	
2	000.15.56812738-000.15.56815920	Rp 341.382.636,-	-	
3	000.15.56815921-000.15.56817385	Rp 429.769.670,-	-	
3	001.15.19467056-001.15.19468841			
4	001.15.19468842-001.15.19472019	Rp 375.933.961,-	-	
5	001.15.19472020-001.15.19473887	Rp 368.764.602,-	-	
5	002.15.22452986-002.15.22453666			
6	002.15.22453667-002.15.22457199	Rp 424.042.585,-	-	
7	002.15.22457200-002.15.22459835	Rp 414.368.367,-	Rp 413.333.472,-	X
8	002.15.22459836-002.15.22463045	Rp 430.011.305,-	Rp 428.090.326,-	X
9	002.15.22463046-002.15.22463112	Rp 367.984.732,-	Rp 367.616.239,-	X
9	003.15.58828322-003.15.58831242			
10	003.15.58831243-003.15.58834427	Rp 422.105.886,-	Rp 422.027.653,-	X
11	003.15.58834428-003.15.58837458	Rp 467.943.524,-	Rp 456.128.494,-	X

Sumber : Internal Perusahaan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara nilai buku penjualan dengan faktur pajak. Perbedaan ini dikarenakan terdapat beberapa faktur yang dibatalkan. Faktur yang dibatalkan tersebut pada buku penjualan tidak dapat dihilangkan, atau dihapus dikarenakan akan berpengaruh pada nomor urut faktur pajak.



Sedangkan pada e-Faktur, untuk faktur pajak batal nilai faktur akan otomatis berubah menjadi 0 (nol), sehingga mengakibatkan nilai akhir pada buku penjualan berbeda dengan nilai akhir pada faktur pajak yang dilaporkan. Beberapa faktur pajak yang dibatalkan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.3.11
Daftar Faktur Penjualan Batal

No	Bulan	Nomor Faktur
1	Bulan Juli 2015	020.002-15.22459084
2	Bulan Juli 2015	020.002-15.22459246
3	Bulan Juli 2015	020.002-15.22459402
4	Bulan Agustus 2015	010.002-15.22461238
5	Bulan Agustus 2015	010.002-15.22462806
6	Bulan September 2015	010.003-15.58831024
7	Bulan Oktober 2015	010.003-15.58834375
8	Bulan Oktober 2015	010.003-15.58833803
9	Bulan November 2015	010.003-15.58837217

Sumber : Internal Perusahaan

Dengan melihat rincian faktur pajak batal pada bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015, dapat disimpulkan bahwa nilai yang terdapat pada buku penjualan PT Lab Medika Sejahtera Surabaya dengan Faktur Pajak penjualan tidak sesuai tetapi dapat dijelaskan, bahwa ketidaksesuaian tersebut diakibatkan terdapat faktur batal.



b. Dokumen penerimaan atau pengiriman barang

Untuk dokumen penerimaan atau pengiriman BKP atas barang yang dijual guna memastikan bahwa barang yang dikirim telah sampai pada pembeli, PT Lab Medika Sejahtera Surabaya menggunakan bukti pengiriman barang dengan cara memberikan tanda tangan dan stempel perusahaan atau apotik pada faktur pembelian yang dikirim bersamaan dengan barang. Perusahaan tidak membuat atau memiliki form khusus untuk penerimaan atau pengeluaran BKP, hanya terdapat catatan internal perusahaan dan stempel serta tanda tangan di faktur penjualan.

Sedangkan untuk pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, sebagian besar atau hampir menyeluruh tidak menggunakan form khusus sebagai bukti pengiriman atau penerimaan barang, sama halnya seperti yang dilakukan PT Lab Medika Sejahtera Surabaya menggunakan faktur penjualan yang ditandatangani dan distempel sebagai bukti penerimaan atau pengiriman barang.

c. Dokumen pembayaran atau penerimaan uang atas pembelian atau penjualan barang atau jasa

Ketika perusahaan melakukan penjualan atau penyerahan BKP kepada pembeli, maka akan timbul penerimaan atas pembayaran BKP tersebut atau jika tidak dibayar tunai atau secara langsung, maka akan timbul piutang. Pada saat penyerahan BKP yang dibayar tunai atau transfer secara langsung, maka perusahaan akan mencatat pada penerimaan kas atau bank.



Begitupula pada saat penyerahan BKP dan tidak dibayar langsung, tetapi pada kemudian hari dibayarkan tunai kas atau transfer maka perusahaan juga akan mencatat penerimaan tersebut kedalam kas atau bank sebagai pelunasan piutang. Pada PT Lab Medika Sejahtera Surabaya, penerimaan pembayaran atas penyerahan BKP dilakukan dengan pembayaran tunai atau kas, transfer, giro dan eek begitu juga dengan pembayaran yang dilakukan oleh PT Lab Medika Sejahtera Surabaya atas penerimaan BKP. Sehingga PT Lab Medika Sejahtera Surabaya memiliki buku penerimaan kas dan bank yang berkaitan dengan transaksi operasional penyerahan BKP.

Pada pencatatan penerimaan kas, menurut penelitian terdapat beberapa kesalahan dalam pencatatan, kesalahan yang terjadi cenderung pada salah pencatatan tanggal lunas dan dobel catat atau input ke tanggal yang berbeda. Sedangkan untuk pencatatan atas pembayaran kas atau bank, tidak banyak kesalahan pencatatan yang dilakukan. Berikut adalah mengambil *sampling* pembayaran faktur secara tunai atau penerimaan kas:

Tabel 4.3.12

Perbandingan Pembayaran Faktur pada Buku Kas

No	No.Faktur	Nilai	Tgl B.Penj	Tgl. BKM
1	811169	Rp 1.060.598,-	17/02/15	03/02/15
2	812163	Rp 1.732.571,-	24/02/15	24/02/15 (2)
				01/03/15
				12/03/15
				16/03/15

3	812459	Rp 631.680,-	11/02/15	11/02/15
				01/03/15
4	812488	Rp 2.120.025,-	24/02/15 Bank	02/03/15
				02/03/15 Bank
5	811230	Rp 223.856,-	03/02/15	02/02/15

Sumber : Internal Perusahaan

Pada pencatatan penerimaan bank juga terdapat beberapa kesalahan dalam pencatatan, kesalahan yang terjadi tidak jauh berbeda dengan kesalahan pencatatan pada kas, yakni salah dalam menginput tanggal lunas. Sehingga dapat dinilai bahwa sistem pencatatan atau penerimaan kas atau bank di perusahaan kurang tercatat dengan baik dan benar. Berikut adalah mengambil *sampling* pembayaran faktur secara transfer atau penerimaan bank:

Tabel 4.3.13

Perbandingan Pembayaran Fatur Pada Buku Bank

No	No.Faktur	Nilai	Tgl B.Penj	Tgl. BBM
1	811211	Rp 1.762.229	04/02/15 Kas	04/02/15
2	810924	Rp 1.320.398,-	06/02/15 Kas	06/02/15
3	812141	Rp 481.768,-	24/02/15	02/03/15
4	812202	Rp 540.618,-	24/02/15	02/03/15
5	457336	Rp 366.960,-	31/07/15	03/0815
6	457403	Rp 1.111.110,-	31/07/15	03/0815
7	456641	Rp 2.873.968,-	31/07115 Kas	03/0815

8	455736	Rp 1.060.876,-	02/08/15	04/08/15
9	456327	Rp 959.940,-	12/08/15	11/08/15
10	473724	Rp 1.427.103,-	05/07/15	07/07/15

Sumber : Internal Perusahaan

Secara keseluruhan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan dari segi kelengkapan belum terpenuhi. Untuk dokumen sebagai tanda bukti pengmmman barang, perusahaan menggabungkannya dengan faktur penjualan, perusahaan tidak membuat dokumen khusus pengiriman barang tersendiri. Dengan data atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan secara keseluruhan, dianjurkan bahwa lebih baik perusahaan tidak melakukan restitusi atau permintaan pengembalian pajak. Apabila dalam perhitungan PPN perusahaan mengalami lebih bayar, lebih baik dilakukan kompensasi pada masa berikutnya